

Politik Keamanan Jagoan Madura

<http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2011.0006>

Ardhie Raditya

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Surabaya. E-mail: diditz_22@yahoo.com

ABSTRACT

This research explains the local strongmen in Madura, named Blater. The power was not only obtained through mastering either economic capital or structural power but through the power can be obtained through managing people security. This research uses descriptive-qualitative method for explaining the result of this research. The result of this research shows that the democracy has been used as an opportunity to reach the power conducted by local strongman in Madura. They were extremely intelligent in creating public fear as a power commodity that was used for political interest, particularly in the election of regional heads. They have established structural-functional relationships indirectly between bureaucrats and security apparatus. With courage and respect values, the Blaters use people's fears as a bridge to compose security politics in the era of democracy.

Keywords: Blater, Power, Security, Madura

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang fenomena orang kuat lokal di Madura yang bernama Blater. Kekuasaan tidak hanya didapatkan melalui penguasaan modal yang bersifat ekonomis maupun merebut kekuasaan struktural melalui proses politik dan demokrasi. Kekuasaan dapat juga diperoleh dengan cara mengelola keamanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan hasil analisa penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa demokrasi dijadikan peluang untuk meraup modal kekuasaan oleh komunitas jagoan lokal di Madura (Blatèr). Mereka sangat piawai menciptakan rasa takut masyarakat menjadi komoditas kekuasaan untuk ditransaksikan secara politik, terutama pada saat proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Mereka lantas secara tidak langsung telah membentuk hubungan struktural fungsional antara penguasa dan aparatus keamanan legal. Dengan didukung budaya keberanian dan nilai-nilai penghormatan, para Blater semakin lincah bermain dengan rasa takut

masyarakat dalam merangkai politik keamanan di era demokrasi.

Kata Kunci: *Blatèr*, kekuasaan, keamanan, Madura

PENDAHULUAN

Kemunculan demokrasi sebagai sistem politik yang paling baik diharapkan mampu menciptakan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang terbebas dari berbagai bentuk dominasi. Demokrasi memberikan kesempatan dan peluang yang sebesar-besarnya bagi pemecahan persoalan aktualisasi diri manusia. Menurut banyak kalangan, demokrasi dapat membebaskan masyarakat dari kemiskinan, karena mereka yang menderita dapat secara langsung menyampaikan persoalan yang terjadi di akar rumput dan kebutuhan apa yang sangat mendesak untuk segera direspon pemerintah (Diamond, 2000). Artinya, demokrasi mendidik masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sebagai manusia yang memiliki hak berbicara, berkomunikasi, berorganisasi, serta mendapatkan pelayanan publik secara layak untuk perbaikan nasib hidupnya. Demokrasi juga mendidik penguasa untuk belajar peka akan kepentingan rakyatnya agar legitimasi sosial terus terjaga.

Namun, demokrasi seringkali memberikan peluang yang lebih luas bagi keberlangsungan hidup komunitas para jagoan yang memanfaatkan demokrasi sebagai jargon kebebasan bertindak dan memperbaiki kesejahteraan hidup. Sebagai komunitas yang rentan terhadap kekuatan aparat hukum, seperti kepolisian, seringkali mereka menggunakan demokrasi sebagai legitimasi aktivitas ekonomi-politik mereka yang sarat kriminalitas dan kekerasan. Komunitas jagoan ini tumbuh dan berkembang di masa sekarang sudah tidak lagi menjaga nilai-nilai kerakyatan. Padahal, komunitas jagoan ini di sejumlah daerah memiliki asal-usul populis karena kekuatan idealismenya menjaga kehidupan rakyat dari berbagai praktek dominasi dan kesewenang-wenangan penguasa. Kita sering mendengar legenda si Pitung, sosok jagoan rakyat Banten, yang mengorganisir rakyat setempat melawan kekejaman dan kejahatan struktural kolonial. Di Madura, sejarah *Blatèr* berawal dari kepentingan resistensi rakyat terhadap kekuasaan kolonial dan penguasa lokal yang sering menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan di Madura (Rozaki, 2004). Kekerasan yang telah mereka lakukan pada masa itu ditujukan untuk gerakan mempertahankan nilai kemanusiaan dari berbagai bentuk

penyelewengan kekuasaan yang dilegitimasi secara kultural dan struktural.

Di era kekinian, ketika negara modern sudah terbentuk dengan berbagai perangkat hukum dan aturan yang mengikat, maka berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan tidak layak lagi dipertahankan secara intensif oleh pihak manapun dengan berbagai kepentingan apapun. Apalagi, sistem politik dan pemerintahan sudah berwujud demokratis, maka persoalan masyarakat harus dipecahkan dengan jalan dialog yang penuh responsif dan empatik. Elit negara memiliki tanggungjawab moral yang lebih berat karena mereka harus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Suara rakyat adalah suara tuhan. Itulah prinsip dasar demokrasi. Maka, aspirasi rakyat harus didahulukan daripada aspirasi penguasa dan koloninya. Dalam rangka pemenuhan distribusi keadilan dalam demokrasi, lantak kue kekuasaan yang pada awalnya tersentralistik di pusat harus terbagi ke tingkat lokal. Terutama di Asia Tenggara yang masih kental nilai-nilai primordialisme, maka kekuasaan lantak tidak hanya dianggap semata-mata milik pusat melainkan juga milik daerah dengan alasan menyalurkan hak-hak politik komunitas tradisional yang selama ini terpinggirkan di pentas nasional (Trocki, 1998:8-9).

Pada kenyataannya, demokrasi dianggap kurang memberikan rasa aman bagi sebagian besar masyarakat. Komunitas jagoan (yang kini lebih dikenal sebagai komunitas premanisme) terus melesat, bahkan kekuasaannya melebihi kekuasaan negara. Aparat hukum, seperti pihak kepolisian, seringkali kewalahan menangani kekuatan komunitas jagoan. Komunitas jagoan seperti bayang-bayang di setiap gerak langkah negara. Mereka semakin kokoh berdiri karena terkadang kekuatan politik ikut menjaga dan menggunakan perannya (Patria dan Gunawan, 2000: xi). Keamanan menjadi kebutuhan yang langka karena kehadiran demokrasi tidak disertai kemapanan ekonomi dan pendidikan politik. Pengetahuan berdemokrasi seolah-olah hanya terhenti di tingkat elite negara dan tidak menetes ke bawah. Sistem demokrasi yang memberikan peluang besar bagi rakyat untuk menyuarkan kemiskinan dan kebodohan yang menimpa mereka ternyata seringkali sekedar pepesan kosong, karena wakil-wakilnya di lembaga pemerintahan kurang sensitif dan responsif. Korupsi uang negara yang banyak melibatkan petinggi pemerintahan negeri ini menjadi contoh kongkrit betapa elit negara belum sensitif dengan kepentingan rakyatnya.

Mereka sepertinya lebih paham bagaimana mengurusinya sendiri dibandingkan menangani kebutuhan dan kepentingan konstituennya.

Keamanan termasuk salah satu kebutuhan mendasar manusia. Thomas Hobbes mengatakan, bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri barbar dan berpotensi saling memakan sesamanya. Karena itulah, dalam rangka memenuhi rasa aman tersebut dibutuhkan lembaga super kuat seperti negara yang dapat mengekang instink naluriah tersebut. Konsepsi negara semacam inilah yang pada akhirnya menciptakan fasisme dan otoritarian. Negara fasis dan otoriter dianggap *leviathan* yang memiliki kekuatan militerisme untuk menciptakan kedamaian. Padahal, dalam sistem politik demokratis ternyata rasa aman yang awalnya berada di tangan negara lambat laun mulai terbelah dan terfragmentasi ke komunitas masyarakat semacam komunitas jagoan. Komunitas jagoan ini menganggap, bahwa merekalah yang paling tahu tentang bagaimana rasa aman masyarakat tersebut diartikulasikan. Negara dianggap gagal menciptakan rasa aman karena ternyata hanya memihak pada kepentingan kelas atas. Di sejumlah negara, munculnya kelompok jagoan seperti bandit dan mafia berawal dari resistensi kelas bawah terhadap eksploitasi sebuah rezim penguasa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Fenomena Robin Hood dan The Godfather adalah fenomena akar rumput yang berorientasi perubahan sosial dengan jalan alternatif dan gerakan kultural (Hobswan, 2000: 143).

Fenomena komunitas jagoan ini lantas menjadi menarik karena kekuatan mereka di tengah kekuasaan negara demokratis mampu “mencuri” peluang untuk terlibat dalam menentukan gerak langkah kehidupan masyarakat. Berasaskan pada prinsip kebebasan berorganisasi dan otonomi politik, eksistensi mereka hampir menyamai eksistensi negara itu sendiri. Maka, terciptalah struktur politik yang bersifat jejaring kebutuhan peranan (*weblike structure*) dalam sistem demokrasi. Jejaring ini saling bersinergis dan fungsional dengan rezim pemerintahan, seperti elit negara dan elite birokrasi (Migdal, 2004: 52). Elit negara membutuhkan elit birokrasi dalam penentuan dan pembuatan kebijakan. Tetapi, kebijakan ini kadangkala menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Dalam sistem demokrasi, kadangkala reaksi keras masyarakat

dapat berakibat anarkis dan kritik keras. Karena itu, kekacauan ini harus diredam dengan jalan memfungsikan peran komunitas jagoan.

Dalam konteks ini, bagaimanakah strategi komunitas jagoan lokal dalam mempertahankan kekuasaannya sehingga kebutuhan rasa aman masyarakat dapat diartikulasikan dengan mengesampingkan idealisme perjuangan atas nama rakyat yang dahulu menjadi landasan lahirnya komunitas jagoan tersebut. Lokasi penelitian dalam mencari pengetahuan atas dasar rumusan masalah tersebut difokuskan pada wilayah Madura. Penelitian tentang komunitas jagoan Madura yang dikenal dengan sebutan *Blatèr* ini hingga kini kurang mendapatkan perhatian banyak kalangan. Karena, aksesibilitas menembus ruang komunitas *Blatèr* ini seringkali sulit ditembus karena tingkat kerawanan yang tinggi. Padahal, komunitas *Blatèr* ini perlu dipotret secara deskriptif-kualitatif sebagai bahan informasi tambahan bahwa komunitas jagoan lokal tidak hanya ada di Jawa, tetapi juga ada di Madura. Ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa kebutuhan rasa aman di tingkat lokal ternyata bersifat menyeluruh di tiap daerah di Indonesia, termasuk juga di Madura. Apalagi, budaya masyarakat Madura yang sering beririsan dengan kultur kekerasan, maka kekuatan komunitas *Blatèr* tersebut semakin memiliki kekuatan yang cukup besar. Bahkan, kekuatan mereka melebihi kekuasaan aparatus keamanan legal-formal.

KERANGKA TEORITIK

Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan merupakan suatu keniscayaan. Sebab, kekuasaan memiliki peran penting. Dengan kekuasaan, kehidupan masyarakat dapat diarahkan dan dikontrol agar kehidupan mereka berjalan sesuai harapan sosial. Itulah sebabnya, banyak kalangan mengatakan bahwa kekuasaan merupakan unsur penting untuk dikaji dalam masyarakat. (Soekanto, 2003:265)

Kekuasaan bukan entitas yang hampa makna. Menurut Dahl, kekuasaan berkaitan erat dengan perilaku, yakni perilaku mempengaruhi orang lain (Haryanto, 2005; 4). Surbakti (1992; 58) menyatakan, bahwa kekuasaan terakit dengan suatu kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi pihak lain agar berperilaku sesuai dengan yang diminta pihak yang menggunakan sumber pengaruh tadi. Kekuasaan, menurut Andrain (1992; 130) adalah penggunaan

sejumlah besar sumber daya untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain. Sekalipun ada perbedaan pandangan dari para tokoh itu tentang arti kekuasaan, pada dasarnya kekuasaan itu memiliki kesamaan. Kekuasaan dianggap kekuatan yang berorientasi pada pembentukan tatanan sosial (Pitaloka, 2005; Laswell, 1984: 9)

Bagaimana *Blatèr* sebagai komunitas jagoan Madura memiliki, mendistribusikan sekaligus mempertahankan kekuasaannya? Penelitian Wiyata (2002) mengatakan, bahwa para *Blatèr* seringkali berhadapan dengan kekuatan hukum legal karena tindakan mereka yang tidak adaptif dengan tatanan stabilitas keamanan sosial. Setiap terjadi konflik dan ketegangan sosial, maka cara yang ditempuhnya bukan melalui jalur hukum, melainkan melalui jalur kekerasan atau *Carok*. Memang agak sulit memaksakan kekuasaan hukum nasional di jalur lokal ketika dihadapkan pada dimensi kultural. Sebab, kekerasan atau carok yang terkadang menghilangkan jiwa dan nyawa orang lain itu muncul karena adanya suatu tindakan yang melukai harga diri mereka sebagai *Blatèr* sekaligus orang Madura.

Berdasarkan penelitian Wiyata (2002), setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang terkait dengan harga diri komunitas *Blatèr*. *Pertama*, perempuan. Berdasarkan hasil laporan penelitian Wiyata, bahwa aksi kekerasan seperti kasus carok kebanyakan (60,4%) terjadi karena disebabkan tindakan mengganggu istri atau tunangan orang lain. *Kedua*, masalah ekonomi. Dimensi ekonomi di sini terkait erat dengan upaya kompetisi tanah warisan dan kecemburuan akibat bisnis yang terjadi di masyarakat Madura. Mereka yang tergolong *Blatèr*, tidak akan takut dan gentar untuk menggunakan cara kekerasan demi mendapatkan surplus ekonomi seperti warisan dan memenangkan kompetisi bisnis. Untuk kompetisi bisnis ini, penelitian yang dilakukan Rozaki (2004) juga memberikan sebuah kontribusi menarik dalam memotret kekuasaan *Blatèr* di Bangkalan. Pertarungan hegemoni antara Kiai dan *Blatèr* seringkali terjadi karena perebutan lahan ekonomis seperti distribusi dana proyek pembangunan. *Ketiga*, masalah interaksi sosial. Kesalahan dalam berkomunikasi dengan orang lain di kalangan *Blatèr* pada umumnya dapat menimbulkan sebuah kemarahan. Mereka tidak memiliki tata kesopanan (*andhâp-asor*) dalam berinteraksi akan dianggap orang yang tidak tahu diri

(*jāngghāl*).

Di setiap daerah, komunitas para jagoan bukanlah bersifat tunggal. Di antara komunitas jagoan itu selalu terjadi diferensiasi sosial. Hasil penelitian Suhartono (1989) menunjukkan bahwa di Jawa, khususnya di Jawa Tengah, terjadi perbedaan kelompok jagoan. Ada yang berjuang di wilayah akar rumput (*populis*) dan ada yang berjuang di wilayah atas (*elitis*). Perbedaan wilayah kerja jagoan ini kemudian menyebabkan kompetisi di antara mereka. Hal ini yang kemudian menciptakan identitas kelompok (*group identity*). Identitas kelompok ini berkaitan dengan makna dari tindakan sang aktor untuk memperkuat institusi sosial berdasarkan nilai-nilai kelompok yang dianut (Castel, 2000: 110). Castel mencoba mengaitkan identitas ini ke dalam tiga kekuasaan. Yakni, identitas yang erat dengan proses legitimasi, identitas yang memiliki nilai resistensi, dan identitas yang berhubungan perubahan kedudukan. Seluk-beluk kekuasaan yang coba diraih oleh para jagoan seperti *Blatèr* bersinggungan dengan perebutan dan pembentukan identitas ini. Sebab, mereka menginginkan eksistensi. Eksistensi inilah yang menjadi pembeda identitas mereka dengan masyarakat pada umumnya.

Dalam identitas itu ada nilai kehormatan yang harus dijaga. Mereka yang kalah bersaing dengan kelompok lain akan dianggap rendah oleh masyarakat sekitar. Penelitian Wiyata (2000) dan Rozaki (2004) tentang *Blatèr* di Madura Barat (Sampang dan Bangkalan) mempertegas tentang hal ini. *Blatèr* tak akan merasa kalah meski dirinya dianggap salah dan kalah. *Anggo'an potè tolang è tèmbang potè mata(h)* (lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup menanggung malu) adalah ungkapan kehormatan para *Blatèr* yang dijadikan prinsip hidup agar optimis dalam mempertahankan kekuasaannya di masyarakat. Ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Blok (1984) tentang jagoan dari Italia, yang dikenal sebagai *Mafia*. Menurut Blok, ada kehormatan kelompok yang harus dijaga oleh anggotanya. Mereka yang tidak mampu menjaga kehormatan itu, akan dianggap pengkhianat dan pantas untuk disingkirkan dari komunitas *Mafia*.

Kehormatan yang harus dijaga oleh kelompok mafia itu adalah kesejahteraan, persaudaraan, dan keamanan para anggota mafia. Kesulitan yang diderita seorang mafia adalah kesulitan semua anggota kelompok

mafia. Karena itu, tindakan apa pun menjadi “halal” untuk dilakukan asalkan penderitaan itu dapat terselesaikan. Di sinilah, letak entitas kekuasaan para jagoan tersebut berjalan dan dikukuhkan dalam rangka menjaga sebuah nilai kehormatan dan identitas kelompok mereka. Hal ini yang dikatakan oleh Foucault bahwa kekuasaan bukanlah suatu milik, tapi strategi. Mereka yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan dapat membangkitkan relasi kekuasaan. Kekuasaan bukanlah kepemilikan tunggal di tangan satu pihak, sehingga seseorang atau sekelompok orang bisa melakukan kekuasaan sendiri terhadap orang lain (di bawahnya) secara total. Kekuasaan dapat digunakan oleh siapa saja, sebagaimana layaknya sistem jaringan pipa kapiler. Dengan demikian, tidak hanya satu individu yang memutar kekuasaan, karena individu-individu yang lain (kelompok individu) juga berada dalam posisi yang serentak menjalankan dan menciptakan kekuasaannya (Foucault, 2002: 122)

Karena itulah, Foucault mengatakan bahwa analisis kekuasaan seharusnya tidak sekadar memusatkan pada tingkat tujuan sadar, tapi pada esensi reproduksi, strategi, dan implementasi bentuk kekuasaan itu sendiri. Perhatian mengenai persoalan ‘*siapa yang memiliki kekuasaan?*’ dan ‘*apa tujuan pemegang kekuasaan?*’, harus dirubah menjadi proses-proses yang membentuk subjek sebagai efek kekuasaan (Sarup, 2003; 126). Itu berarti, kelompok minoritas tidak sendirinya menjadi pihak yang kalah dalam relasi kuasa, karena dunia masyarakat tersusun atas sebuah keseimbangan kekuatan yang bersifat kompleks, dan kekuatan itu tidak bisa direduksi pada kekuasaan absah (*legitimate force*) saja. Karena, kekuasaan diibaratkan permainan yang menyenangkan dan siapa saja boleh terlibat di dalamnya (Latif, 2005; 39-42)

Kekuasaan didapatkan dan dipertahankan tidak hanya melalui kekuatan fisik dan otot semata. Tetapi, juga melalui persepsi situasi (*situation perception*) sehingga hal itu mampu menguasai alam pikiran massa. Disanalah ada sebuah proses informasi yang didistribusikan dari pihak satu ke pihak lainnya yang memiliki posisi lemah dari sudut pandang kekuasaan. Dalam pemikiran Foucault (2002), bahwa dia yang memiliki pengetahuan juga menguasai kehidupan. Kebenaran dan keotentikan dari pengetahuan seperti ini tentu tidak bisa dibuktikan nilai kevaliditasnya. Karena ada ideologi yang menopang dibaliknya. Mainheim (1992) menjelaskan bahwa

bahasa yang ada dalam arena kekuasaan adalah bahasa yang penuh kebohongan dan kepentingan, sehingga akan sangat sulit untuk dijadikan sebuah pegangan moralitas universal. Menurut Hobsbwan (2000), kelompok jagoan atau bandit di kebanyakan negara kerap kali menggunakan bahasa ketakutan dan menyebarkan suatu isu yang dapat membuat masyarakat berada dalam ketidakamanan. Dari situasi itulah, para bandit dengan mudah mempengaruhi orang lain untuk menjadi tunduk, patuh, serta takut terhadap mereka. Kehidupan *Blatèr* tidak jauh beda dengan apa yang telah diteliti Hobsbwan. Rozaki misalnya mengatakan, bahwa *Blatèr* di Madura Barat kerap kali mengkondisikan kehidupan warganya dalam keadaan bahaya dan penuh ketakutan. Sehingga, mereka tidak berani melawan dan mengganggu kehidupan *Blatèr*.

Blatèr, dalam persepsi orang Madura seringkali diidentikkan dengan sekelompok kekerasan. Ada banyak karakteristik yang melekat dalam diri *Blatèr*. Berdasarkan temuan lapangan, karakteristik *Blatèr* adalah sekelompok orang yang hidupnya sangat lumrah dengan praktek kriminalitas seperti berjudi, mencuri, mengkonsumsi miras, membunuh hingga merampok. *Blatèr* juga kerap mengatasi persoalan prinsipil (terutama terkait dengan masalah harga dirinya) melalui cara-cara kekerasan seperti carok. Karena itu, tidak heran apabila senjata tajam khas Madura seperti clurit dan belati menjadi benda yang selalu dibawa (*disèkep*) ke manapun mereka pergi. *Blatèr* merupakan sosok yang selalu siap-siaga dalam berbagai medan. Seseorang dianggap *Blatèr* apabila mengikuti tradisi *rèmo*. Tradisi *rèmo* ini adalah aktivitas perkumpulan dan pertemuan antar *Blatèr* yang dikemas dalam bentuk arisan dalam periode tertentu yang disetiap pertemuan itu disuguhkan *sandur* (penari), minuman keras, dan penyerahan sejumlah uang kepada tuan rumah. Selain tradisi *rèmo*, *Blatèr* biasanya menyukai hiburan tertentu, seperti sabung ayam (*adduân ajem*) dan kerapan sapi. Kedua hiburan ini bukan sekedar media melepaskan lelah, melainkan sebagai ajang untuk memperkuat ke-*Blatèr*-annya (karena ada ritual unjuk keberanian). *Blatèr* umumnya memiliki istri lebih dari satu orang. Di mata mereka, semakin banyak istri maka semakin tinggi tingkat kekuatannya (kejantanannya). Karena *Blatèr* ini dianggap pelaku kriminalitas, maka keberadaannya tersembunyi dari masyarakat luas. Sekalipun demikian, bukan berarti mereka itu tidak bisa ditemukan, karena

masyarakat sekitarnya mengetahui dengan jelas siapa saja sosok *Blatèr* di masyarakat sekitar.

HASIL DAN ANALISIS

1. Kondisi Sosial Demografis Madura

Secara geografis, pulau Madura terletak di sebelah timur laut pulau Jawa dengan koordinat 7° lintang selatan dari khatulistiwa, dan antara 112° dan 114° bujur timur. Panjang pulau Madura kurang lebih 190 Km, jarak terlebar 40 Km dan luas keseluruhan 5.304 Km². Ketinggian Madura dari permukaan laut berkisar antara 2 meter-350 meter. Antara pulau Jawa dan Madura dipisahkan dan disekat oleh Selat Madura. Madura memiliki 4 (empat) kabupaten. Menurut letak dan wacana yang berkembang di Masyarakat setempat, empat kabupaten itu diklasifikasikan menjadi Madura *Bara'* (Barat) yang terdiri dari Bangkalan dan Sampang, dan Madura *Tèmor* (Timur) yakni, Pamekasan dan Sumenep. Meski beda lokasi, tapi kondisi sosial-budaya masyarakat di Madurat Barat dan Timur itu tidak jauh berbeda. Ini disebabkan latar belakang historis pulau Madura yang berasal dari kelompok dan keturunan yang sama seperti yang tertuang dalam legenda nenek moyang Madura, Raden Sagoro dari kerajaan Mandangkumalan (Wiyata, 2002). Bahkan, raja-raja yang ada di Madura dahulu kala masih tergolong satu garis keturunan. Hanya saja, perebutan kekuasaan yang diprovokasi oleh *Devide at Ampera* kolonial yang kemudian membuat penguasa di Madura mendirikan wilayah kekuasaannya sendiri di tiap-tiap daerah (Zulkarnaen 2003; Fatah, 1912).

Dari segi luas, keempat kabupaten itu berbeda. Sumenep, merupakan kabupaten terluas (baik dari segi lahan dan wilayahnya) diantara empat kabupaten lainnya yang ada di Madura. Luas masing-masing Kabupaten di Madura adalah; Bangkalan 1.260 Km², Sampang 1.233 Km², Pamekasan 792 Km², serta Sumenep 1.989 Km². Total luas lahan di Madura adalah 469,590 Ha, dengan rincian: di Kab. Bangkalan 116,607Ha, Sampang 123,084 Ha, Pamekasan 77 Ha dan Sumenep 152,104 Ha. Luas lahan Madura secara keseluruhan tentu relatif kecil apabila dikomparasikan dengan luas wilayah Jawa Timur. Jika Total luas lahan di Madura 469,590 Ha, sementara luas Jawa Timur adalah 4,176,032 Ha. Ini menunjukkan bahwa luas lahan di Madura relatif lebih

kecil dibandingkan luas lahan yang ada di Jawa. (Niehof, 1948: 26).

Madura tergolong wilayah tropis dengan memiliki dua musim, yakni penghujan (*nambara'*) dan kemarau (*nèmor*). Musim penghujan, ini berlangsung mulai pertengahan bulan November hingga permulaan bulan April, dan ketika itu suhu udara berkisar pada angka 28° dengan jumlah hujan turun rata-rata 16 hari/bulan, dan curah hujan sekitar 200-300 mm. Sedangkan musim kemarau, terjadi bulan Mei hingga pertengahan bulan Oktober, dengan suhu rata-rata 30°. Kini, suhu udara biasanya sangat panas dan beberapa sungai mengering. Ketika musim pancaroba, rata-rata curah hujan tak lebih 100 mm/bulan. Namun, perbedaan mencolok adalah pada daerah pedalaman yang lebih tinggi, hampir selalu mengalami musim hujan selama enam bulan berturut-turut. Sedangkan, daerah yang rendah, musim penghujan itu biasanya berlangsung tidak lebih dari tiga atau empat bulan lamanya (Wiyata, 2002: 32-33).

Madura merupakan bagian dari sekian banyak daerah di Jawa Timur yang memiliki kondisi alam yang kurang menguntungkan bagi aktifitas pertanian (Kuntowijoyo, 2002: 49). Dikomparasikan dengan daerah yang ada di Jawa, pulau Madura tentu memiliki kondisi lahan yang terbilang tandus, kurang subur bagi tanaman pertanian pada umumnya. Karena, permukaan tanahnya didominasi oleh susunan batu kapur dan endapan kapur, dengan lapisan aluvial laut di sepanjang pantai utara dan empat dataran aluvial sungai (satu di barat, dua di selatan dan satu di timur). Itu artinya, di Madura bagian timur (Sumenep dan Pamekasan), seluruh tanahnya terdiri dari bebatuan nepal dan kapur, ditambah batu alam lainnya yang sangat keras (De Jonge, 1989: 6). Karena itulah, tidak heran jika banyak nama desa di Madura timur yang identik dengan bebatuan (*bâto*), seperti Bâtoporran, Bâtobhella, Bâtobintang, Bâtoampar, dan Bâtopote. Bahkan, ada jargon masyarakat Madura timur yang mengidentifikasikan orang desa dengan istilah orang *gunong na'nong bâto klèttak* (orang yang tinggal di bukit yang di sekitarnya penuh bebatuan).

Sebagai kelanjutan dari pegunungan kapur di Pulau Jawa, tentunya kondisi tanah Madura sebagaimana terdeskripsi di atas wajar adanya. Induk pegunungan kapur yang membuat kondisi tanah di Madura kurang subur adalah pegunungan kapur yang ada di Jawa-yang terpisah sewaktu periode pasca-glacial. Tepatnya di daerah Rembang, sekitar bagian utara

dan selatan lembah Solo, Grobogan, hingga Bojonegoro (Subahianto, 2004: 16). Itu sebabnya pada masa kekinian selain kondisi tanah yang kurang subur, tandus, kasar, kering, juga membuat suhu udara Madura terasa panas, terutama di kala musim kemarau tiba. Tidak heran apabila kebanyakan orang luar Madura belakangan ini yang pernah berkunjung ke pulau garam itu akan mengatakan bahwa Madura sangat panas.

Salah satu ciri tanah yang didominasi oleh kapur itu adalah karakteristik warna tanahnya yang coklat agak kemerah-merahan karena adanya campuran pasir kuarsa dan mineral-mineral lainnya (Kuntowijoyo, 2002: 26). Katika endapan dan kandungan kapur di suatu pegunungan itu hanyut karena adanya perubahan alam ataupun periode glasial, maka yang dibawa adalah lempung dan napal hingga membuat tanah dibagian bawahnya berwarna kuning muda. Tipe tanah tegalan seperti di Madura ini, mudah digerogeti erosi oleh air selama musim penghujan dan oleh angin saat musim kemarau (Leunissen, 1989: 239). Sebagai gambaran, di Kab. Pamekasan ada sekitar 35.762 Ha tanah tegalan, sementara tanah sawah irigasi 1.483 Ha, sawah semi 6.275 Ha, dan sawah tadah hujan 7.272 Ha (BPS Pamekasan, 2006). Ini menunjukkan bahwa tipe tanah tegal lebih dominan di Madura dibandingkan tipe tanah sawah yang notabene amat subur dan cocok untuk lahan agrikultur. Dominasi tanah tegalan ini kemudian berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Madura pada umumnya. Menurut sejumlah kalangan peneliti bahwa 80% kemiskinan di Madura disebabkan karena tipikal tanah tegalan yang berkarakter tandus. Sehingga, masyarakatnya tak memungkinkan menghasilkan beragam tanaman pertanian yang prospektif (Wiyata, 2002; De Jonge, 1989; Mansurnoor, 1990)

Jumlah penduduk di Madura secara umum selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data statistik tahun 2006 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Madura sebesar 3.690.580 jiwa yang tersebar di 4 kabupaten: Bangkalan 945.863 jiwa, Sampang 894.046 jiwa, Pamekasan 782.076 Jiwa dan Sumenep 1.068.595 jiwa. Data ini meningkat tajam dibandingkan jumlah penduduk Madura pada 2005 sebanyak 3.626.644 jiwa dan 2004 sebanyak 3.563.888 jiwa, dan 2003 sebanyak 3.491.951 jiwa. Untuk selanjutnya bisa dilihat di tabel.

TABEL 1. JUMLAH PENDUDUK MADURA/KABUPATEN TAHUN 2003-2006

No.	Kabupaten	2003	2004	2005	2006
1.	Bangkalan	886.077	907.651	926.560	945.863
2.	Sampang	833.460	855.405	874.512	894.046
3.	Pamekasan	740.154	755.331	768.587	782.076
4.	Sumenep	1.032.260	1.045.501	1.056.985	1.068.595
	Total	3.491.951	3.563.888	3.626.644	3.690.580

Sumber: Profil Kab. Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep Tahun 2006

Berdasarkan tingkat kepadatan, Madura tergolong lebih besar dibandingkan dengan Jawa Timur. Di 2006 tingkat kepadatan (orang/Km²) di Jatim sebesar 768 jiwa/Km². Sementara di Madura apabila memfokuskan pada dua kabupaten, Pamekasan dan Sumenep (sebagai lokasi penelitian ini) jumlahnya cukup mencolok. Di kabupaten Sumenep misalnya, pada tahun 2006 tingkat kepadatannya sekitar 504 jiwa/Km² dan di Pamekasan sekitar 918 jiwa/Km². Di Sampang tingkat kepadatan sekitar 678 jiwa/Km² dan Bangkalan sekitar 744 jiwa/Km². Jika dibandingkan dengan luas wilayah Madura yang sebesar 5.304 Km², maka tingkat kepadatan penduduk di Madura itu tentu cukup tinggi. Pada tahun sebelumnya, tingkat kepadatan penduduk di Madura juga tidak jauh berbeda. Berdasarkan hasil riset Wiyata (2002) bahwa tahun 1994 kepadatan penduduk di Madura tergolong lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur. Kondisi demografis ini yang membuat kondisi ekonomis masyarakat Madura memprihatinkan. Ini dikarenakan selain tipe tanah Madura yang gersang dan tandus, juga karena jumlah lahan pertanian semakin minim dan anggota keluarga yang harus dihidupi semakin banyak.

Karena itulah, kemiskinan di Madura menjadi tidak terhindarkan lagi. Setiap tahun, angka kemiskinan di Madura mengalami peningkatan. Berdasarkan statistik BPS Jatim 2007, total angka kemiskinan di Madura sebesar 1.370.580 jiwa. Pada tahun 2004, jumlah kemiskinan di Madura hanya sekitar 905.784 jiwa. Ini menunjukkan adanya peningkatan angka kemiskinan sebesar 20-30% selama kurun waktu 3 tahun. Kemiskinan di Madura bisa dikatakan relatif besar apabila dibandingkan dengan daerah tapal kuda (daerah pedalungan: etnis Madura campuran) seperti di Pasuruan, Jember, Probolinggo, Situbondo serta Bondowoso. Total angka kemiskinan di lima kabupaten kota tapal kuda itu pada tahun 2007 hanya sekitar 1.151.071 jiwa. Sementara 2004, kemiskinan itu di lima kota

tersebut sekitar 1.479.170 jiwa. Dengan demikian, ada penurunan kemiskinan di lima kabupaten tersebut dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, sementara di Madura yang terjadi justru sebaliknya.

Hingga kini, aktivitas bertani dan nelayan justru masih dominan bagi masyarakat Madura pada umumnya. Menurut Huub De Jonge (1989; 35), kurang lebih sekitar 70%-80% dari jumlah penduduk Madura menopang hidup perekonomiannya bergantung pada aktifitas agraris. Sementara, kurang lebih seperempat ($\pm 8\%$) dari angkatan kerja (di Jawa Timur dan Madura) berprofesi sebagai nelayan. Jumlah ini diperkirakan lebih besar lagi, jika masyarakat Madura yang bekerja sebagai nelayan sambilan (ketika pertanian kurang memberi prospek di masa tertentu¹) turut dimasukkan di dalam jumlah angkatan kerja. Itulah sebabnya tidak berlebihan kiranya apabila ada yang mengatakan bahwa pertanian merupakan tulang punggung utama masyarakat Madura, baik itu pada masa awal keberadaannya ataupun hingga pergantian jaman (Niehof, 1985: 28).

Secara spesifik, petani lebih banyak jumlahnya di Madura Timur dibandingkan Madura Barat. Menurut Niehof menunjukkan bahwa jumlah petani dan nelayan sekitar 88,2% di Pamekasan (dari total penduduknya), 78,2% di Sumenep, 77,4% di Sampang, 76,9% di Bangkalan. Padi, Jagung, Singkong, serta Tembakau merupakan tanaman pokok pertanian di Madura. Pada abad ke XIX, tanaman pokok itu justru menjadi komoditas andalan bagi masyarakat Madura. Pada tahun 1916, hasil panen padi di Madura sebesar 84.065 bau (1 bau = 0,7096 hektar), Jagung 342.852 bau dan Singkong 35.734 bau. Lima tahun kemudian (1921), padi berhasil dipanen sebesar 93.876 bau, Jagung 391.314 bau, kemudian Singkong 152.194 bau. Tahun 1925, hasil panen padi di Madura bertambah menjadi 112.665 bau, Jagung 463.251 bau dan Singkong 78.551 bau. Dibandingkan hasil panen tanaman yang sama di Jawa (secara keseluruhan), tentunya hasil panen di Madura sangat jauh tertinggal. Sekalipun demikian, Madura memiliki andil besar dalam produksi Jagung bagi daerah Jawa-Madura, yaitu lebih dari 50% (Kuntowijoyo, 2002: 50-51).

Diperkirakan bahwa dari total hasil panen padi, jagung dan singkong tersebut, justru Madura Baratlah (Sampang dan Bangkalan) yang sangat

besar jumlah panennya dibandingkan Madura Timur (Pamekasan dan Sumenep). Ini tentu beralasan, karena tipe tanah sawah lebih dominan di Madura Barat, sementara tipe tanah tegalan justru lebih dominan di Madura Timur. Mungkin, karena aliran sungai yang panjang dan curah hujan terbesar ada di Madura Barat. Sementara, hutan Madura Timur itu mulai sedikit, banyak ditebangi demi keperluan aktifitas kelautan. Padahal, keberadaan hutan dapat memberi kontribusi besar bagi tingkat kesuburan tanah. Karena tanah tegalan lebih mendominasi Madura Timur, maka dapat dimengerti jika tanaman tembakau banyak dihasilkan di daerah ini. Ini disebabkan, karena tembakau tidak memerlukan banyak air.

2. Stratifikasi Sosial Dan Kultur Masyarakat Madura

Karakteristik masyarakat pertanian adalah terjadinya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini ditandai oleh terjadinya polarisasi kedudukan, kekuasaan, hak istimewa dan hak milik sumber daya alam (Sanderson, 2003). Pada masyarakat primitif, yang lebih banyak mengandalkan kehidupannya pada alam yang bebas (berburu, meramu, memancing, dll) justru yang terjadi adalah ketidaksamaan sosial (diferensiasi sosial). Diferensiasi sosial, dan bukan stratifikasi sosial, hanya ditandai atas perbedaan personal (seperti jenis kelamin ataupun keberanian). Tetapi, setelah masyarakat memasuki kehidupan agraris, maka yang terjadi adalah penguasaan atas lahan garapan dan perbedaan yang tegas akan batas atau garis teritorialnya. Kondisi inilah lantas memunculkan berbagai kelompok yang memiliki penguasaan atas sumber daya dan posisi sosial tertentu untuk mengatur penduduk dalam teritorialnya. Penduduk yang semakin padat harus dikontrol, agar kapasitas dan kuantitas tanah garapan bisa memberikan jaminan hidup dan kesejahteraan. Berdasarkan perspektif Lenski (dalam Sanderson, 2003:160), tekanan penduduk dan kemajuan teknologi dalam aspek holtikultura pada akhirnya menyebabkan terjadinya penguasaan atas kepemilikan tanah. Dalam perkembangannya, tanah yang semakin langka pada akhirnya menimbulkan egoisme atas sumber daya ekonomis di berbagai sektor. Inilah yang kemudian cikal bakal stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Rumusan teori stratifikasi Lenski adalah sebagai berikut :

TEKANAN PENDUDUK ---> KEMAJUAN TEKNOLOGI ---> KELANGKAAN TANAH
---> EGOISME ---> STRATIFIKASI SOSIAL

Dilihat dari latar belakang geografis dan demografisnya, tentu masyarakat Madura tergolong masyarakat agraris. Hal itu terbukti, dari dominannya mata pencaharian sebagai petani. Karena itu, di dalam kehidupan masyarakat Madura pun terjadi stratifikasi sosial. Setidaknya, terdapat tiga lapisan sosial dalam masyarakat Madura. Yakni, lapisan atas, menengah dan bawah. Perbedaan lapisan sosial dimasyarakat Madura ini didasarkan pada dimensi kekuasaan, kekayaan, hak istimewa (bangsawan), kepintaran ataupun kultural (kharismatik, agama dan kesaktian). Lapisan atas di masyarakat Madura terdiri dari orang kaya (*rèng soghi*), penguasa (*pamarènta*), keturunan raja (*parjâji*) dan berilmu (*ghuru*, *rèng seppo*, *blatèr*). Kelas menengah ditempati oleh pegawai negeri (*pongghabhâ*). Sementara, lapisan bawah masyarakat Madura terdiri dari orang miskin (*rèng miskèn*), rakyat (*rèng kèni'*), petani (*rèng tanih*), nelayan (*majâng*), orang bodoh (*rèng bhuduh*) dan pengangguran (*ta' alakoh*).

Mereka yang berada di lapisan sosial atas memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Madura pada umumnya. Rakyat Madura akan lebih patuh kepada mereka. Ini disebabkan adanya kultur kepatuhan dan tipe ideal kepemimpinan masyarakat Madura itu sendiri. Kultur inilah yang dikenal dengan istilah *Buppa-bhabhu'* (orang tua), *Ghuru* (guru, kyai, orang pintar), *Rato* (penguasa dan pemerintah). Mereka yang bersikap tidak patuh, apalagi bersikap tidak sopan pada lapisan atas tersebut, maka masyarakat setempat akan menganggapnya tidak beradab (*ta' dhâpor*, *langka*, *jângghel*). Nah, salah satu indikasi sikap kepatuhan dan kesopan itu tercermin pada saat menunduk (*agâlènon*) jika berjalan melewati mereka yang tergolong tinggi posisi sosialnya. Bersikap sopan terhadap mereka yang posisi sosialnya lebih tinggi juga bagian tata nilai *andhâp asor* (kultur sopan-santun). *Andhep asor* ini telah menjadi panduan berinteraksi di dalam kehidupan masyarakat Madura selama ini. Bahkan, tradisi ini pulalah menjadi bagian dari kerangka kehormatan dan harga diri orang Madura.

Bukan hanya perilaku kesopanan itu yang harusnya diejawantahkan dan dipelihara, tetapi juga lisan. Setidaknya ada dua hal yang berkaitan dengan budaya lisan masyarakat Madura yang harus dijaga. *Pertama*, tingkatan bahasa (*dheg-ondegghâ bâsa*). Tingkatan bahasa ini berkaitan erat dengan pilihan bahasa yang haruslah digunakan saat berkomunikasi

dengan orang lain. Secara umum ada tiga tingkatan bahasa Madura, yakni bahasa halus (*enghi-bhunten*), bahasa menengah (*engghi-entèn*) dan juga bahasa kasar (*enje'iyye*). Bahasa halus (atau kromo dalam istilah Jawa) biasa digunakan ketika berhadapan dengan orang yang lebih tinggi status sosialnya seperti kyai, orang tua, pemerintah, juragan, dll. Bahasa menengah biasanya digunakan saat lawan bicaranya dianggap lebih dewasa, seperti adik terhadap kakaknya, bapak terhadap menantunya, dll. Bahasa menengah ini bukan menjadi petunjuk stratifikasi sosial, melainkan lebih kepada perbedaan sosial. Bahasa kasar biasanya digunakan ketika lawan bicara adalah teman kita sendiri (teman sebaya) (Fath, 2007; Raditya, 2008).

Kedua, aspek kejujuran dan kesantunan. Bahasa tak hanya mengandung tingkatan, tapi juga memiliki makna psikologis bagi penggunanya. Bahasa yang halus bisa menusuk hati apabila dibalik kata-katanya mengandung aspek fitnah, kebohongan, serta provokasi. Karena itu, penggunaan kata-kata yang santun dan penuh kejujuran harus diutamakan di saat berkomunikasi dengan orang lain. Kadangkala makna kata bisa berbeda-beda, namun perbedaan makna ini bisa ditolerir dan tidak menimbulkan ketegangan apabila diucapkan secara jujur, empatik serta tidak diikuti simbol-simbol keangkuhan. Orang yang berkata terima kasih dengan sikap sopan dan diikuti tatapan mata yang wajar akan lebih dihargai, daripada diikuti dengan tatapan mata yang penuh kemarahan dan nada yang keras. Karena itu, masalah lidah terkadang bisa menimbulkan konflik-kekerasan di masyarakat Madura. Maka tak heran jika kultur masyarakat Madura memegang teguh slogan budaya *mon copa la gâgghâr ka tana, ta' bisa è jhilât polè* (kata-kata yang terlanjur menyakitkan tidak mudah dihapus).

Masyarakat Madura dikenal dengan masyarakat yang memegang teguh kultur patriakhirnya. Setiap anak laki-laki di Madura sudah dibiasakan untuk berani, kuat, tidak mencla-mencle dan tegas. Anak laki-laki Madura yang penakut dianggap tidak punya kenjantanan. Istilah *ketto' pala'en* (potong alat kelaminmu) dan *ngangguy sampèr* (memakain rok) seringkali diucapkan kepada lelaki Madura yang penakut. Ada semacam nilai dan norma sosial bahwa kehormatan dan harga diri lelaki Madura terletak pada keberaniannya (*angko, bengalan*). Bagi masyarakat Madura, anak laki-laki yang ketahuan menangis akan dimarahi orang tuanya. Karena

menangis adalah simbol dari perempuan, dan seorang laki-laki harus bersikap maskulin dan jantan.

Kultur kekerabatan masyarakat Madura juga dikenal kuat. Sesama kerabat harus rukun. Saling tolong menolong. Meskipun terjadi konflik diantara saudaranya, hendaknya diselesaikan secara baik-baik tanpa harus memutuskan tali kekerabatan. Jika sampai terputus tali kekerabatannya, maka mereka akan dianggap orang *nespa* dan *kasta dibudina* (menderita dan menyesal karena tak punya saudara). Tuntutan mempererat tali hubungan kekerabatan ini terlihat dari pribahasa Madura yang berbunyi *ja'ngakan tolang taretan dibi'* (jangan menjalimini saudara sendiri). Hubungan pertemanan juga dapat meingkat menjadi hubungan persaudaraan, ketika diantara teman telah terjalin ikatan batin dan emosional yang kuat. Sebagaimana prinsip *Kanca daddi taretan*. Hal yang diutamakan dalam pertemanan adalah kesungguhan, kejujuran, kasih sayang dan pengertian. Bukanlah semata-mata kepentingan sesaat belaka. Seperti yang diungkap dalam pemeo masyarakat Madura: *mon akanca ben ataretan je' tong-etongan ma'le akor salanjengnga* (dalam persahabatan janganlah mengedepankan kalkulasi ekonomis).

3. Kriminalitas Dan Kuasa *Blatèr* Madura

Alam menyediakan segala kebutuhan mendasar manusia, alam merupakan gudang makanan bagi masyarakatnya. Aktivitas kerja menjadi penggerak untuk menghasilkan kebutuhan mendasar manusia dari alam. Tanpa kerja, kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi. Dalam perkembangannya terjadi perubahan yang terkadang mengubah pola hidup masyarakat. Manusia primitif yang seringkali berbuat barbar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membuat kehidupan sosial menjadi keras, penuh konflik. Nyawa dianggap sesuatu yang mudah untuk diserabut dari pemiliknya hanya demi mendapatkan sesuap nasi. Maka, muncul keinginan manusia untuk mengatur kehidupan masyarakat yang awalnya bebas agar menjadi terikat di bawah struktur sosial yang penuh dengan aturan agar kehidupan manusia tidak liar dan barbar. Terjadilah yang dinamakan kontrak sosial. Kontrak sosial inilah yang kemudian melahirkan sebuah negara dan sistem pemerintahan. Fromm (2005) mengatakan bahwa kebebasan manusia untuk memenuhi kebutuhannya

dari alam diatur sepenuhnya oleh negara pasca kolonial. Negara menjelma sebagai kekuatan “adikodrati”, menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan masyarakatnya melalui berbagai pelayanan publik dan kebijakan ekonomi-politik.

Madura, pada awal sejarahnya juga mengalami kondisi masyarakat primitif. Masyarakatnya masih belum berada dalam kontrol kekuasaan negara modern seperti saat ini. Sejarah kedatangan penghuni pertama Madura, Raden Sagoro menjadi buktinya. Raden Sagoro beserta pengikutnya bisa menikmati makanan dan tempat tinggal yang didapatkan dari alam sekitar (Rifa'i, 1993). Munculnya kerajaan-kerajaan dan kekuasaan kolonial Belanda membuat Madura semakin terkontrol secara ketat. Sehingga, bermacam kebutuhan masyarakatnya dibawah kebijakan penguasa. Terjadilah stratifikasi sosial dan diferensiasi pekerjaan yang berjalan hingga kehadiran negara modern seperti saat ini. Lalu, muncul sebuah budaya kepatuhan terhadap penguasa (*ratoh*), karena penguasa ataupun pemerintah inilah yang dijadikan tumpuan harapan terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial (Raditya, 2008). Pada kenyataannya harapan akan keadilan dan kesejahteraan itu tidak berjalan secara humanis. Dalam konteks ini kami mencoba melacak terjadinya penderitaan dan kemiskinan secara historis².

Ketika kursi kekuasaan bergeser dari VOC ke pemerintah Belanda awal abad 18, Indonesia dan termasuk Madura telah menjadi negeri jajahan yang sebenar-benarnya (Riklefs, 2005: 259). Sistem dualistik ekonomi-politik yang digunakan Belanda dalam mengeksploitasi negeri jajahannya mulai diterapkan. Yakni, sistem liberal dan sistem konservatif. Sistem liberal ini bisa terlihat dari adanya sistem sewa tanah (*land-rent*). Sistem sewa tanah ini dibawa oleh Raffles pada saat menjadi gubernur Jenderal di Jawa (1811-1816). Sewa tanah yang harus dibayar penduduk umumnya 2/5 atau 40% dari hasil tanaman pokok (biasanya padi). Raffles memandang tanah adalah milik pemerintah. Ia merombak struktur feodal yang menjadi corak kerajaan. Baginya, penguasa pribumi cenderung korup, lalim, suka berbohong dan tak dapat dipercaya. Karenanya, hasil panen rakyat dipegang langsung oleh pemerintah kolonial, bukan dikelola oleh elite pribumi seperti masa kerajaan atau feodal tempo dulu.

Penguasa pribumi Madura pun akhirnya menjadi alat pemerintah

Belanda untuk mengawasi pembayaran pajak setiap cacah dalam unit desa. Sistem pajak *in natura*, kerja wajib dan pelayanan bagi penguasa pribumi yang berbentuk tradisional mulai digantikan dengan pola modernistik. Pajak yang dulunya berupa hasil panen digantikan dengan uang kontan. Monoteisi di pedesaan pun terjadi. Rakyat menjadi pekerja bebas yang diatur oleh upah. Jadi, mereka bebas menjual tenaganya kepada siapa saja. Penguasa pribumi yang di sistem kekuasaan tradisional sebagai pemegang kekuasaan langsung terhadap rakyatnya, maka dalam sistem modern mereka hanya sekedar menjadi jalur perantara Belanda saja. Artinya, penguasa pribumi itu diangkat menjadi karyawan di pemerintahan Belanda yang sifatnya legal-rasional (*ambetenar*) dengan gaji bulanan, (bukanlah dengan tanah). Pengangkatan karyawan administrasi Belanda itu biasanya bersifat turun-temurun dari keluarga priyayi Madura. Penguasa pribumi ini tentunya tidaklah hanya memperoleh gaji, tetapi juga memperoleh persenan dari para penyewa tanah dan juga memperoleh beberapa bagian dari hasil kelebihan pajak yang disetorkan.

Pada sistem konservatif Belanda dapat tampak dari adanya penerapan sistem kerja paksa dan budi daya pertanian atau dikenal dengan *Cultuurstelsel*. Sistem yang dibawa oleh Van Den Bosh (1830-1870) ini membenahi logika eksploitasi kaum liberalis Inggris. Pada sistem ini, kedudukan penguasa pribumi atau priyayi itu disakralkan lagi, namun tetap mempertahankan kedudukannya sebagai birokrasi pemerintahan kolonial. Priyayi dan penguasa pribumi ini memiliki kekuasaan kembali dalam mengorganisir dan memerintahkan kepada rakyatnya guna memberikan tenaganya dalam aktifitas pertanian dengan cuma-cuma atas nama raja. Sehingga, di dalam sistem *cultuurstelsel* ini tidak ada lagi yang namanya petani bebas, dalam arti menjual tenaga kerjanya. Yang bebas hanya tanah itu sendiri, dalam arti tanah bisa disewakan kepada siapa pun yang bermodal (orang Cina, Eropa, dan pedagang kaya) tetapi hasil sewa ini tetap mengalir ke negara induk (Belanda). Semua rakyat, harus bekerja memenuhi kepentingan rajanya. Rakyat diwajibkan menyerahkan hasil panen pertaniannya kepada Belanda. Tenaga kerja mereka dibayar dengan beberapa uang, bahkan terkadang tidak dibayar karena mereka itu dianggap memberikan pelayanan terhadap sang raja. Jika pun dibayar dengan hasil panen, jumlahnya amat minim, kira 1/3nya saja.

Dalam sistem tanam paksa, rakyat di pedesaan harus menyediakan *seperlima* dari tanahnya untuk tanaman ekspor (kopi, tebu dan tembakau) dan *seperlima* waktu kerjanya guna mengurus tanaman pertanian. Rakyat dituntut memperhatikan keinginan rajanya, pengusaha asing dan penguasa kolonial Belanda. Jika mengalami gagal panen, maka tak diberikan ganti rugi. Penguasa pribumi pun harus mengawasi secara ketat aktifitas kerja yang dilakukan rakyatnya. Sebab, pemerintah Belanda tidak menginginkan tuntutan berlebihan dari rakyat yang dapat mengganggu jalannya kepentingan ekonomi Belanda (Kartodirjo, 1977). Konsentrasi pengerukan sumber bumi negeri jajahan perlu dilakukan untuk menutupi krisis keuangan Belanda yang sebelumnya banyak dikeluarkan untuk biaya perang melawan Belgia, perang Padri (1815-1824), perang Jawa ataupun perang Diponegoro (1825-1830), perang melawan perompak di Makasar, Bugis dan Bali.

Fenomena kriminalitas mulai menguak, menjadi aktifitas sosial yang kemudian mengganggu sistem perpolitikan kerajaan dan kolonial itu sendiri. Pada tahun 1840-1850an setidaknya masyarakat Madura dipenuhi dengan teater pembunuhan di alun-alun kota. Di Sumenep misalnya, dalam satu hari terjadi setidaknya 3 kali pembunuhan. Institusi peradilan dan hukum setempat tidak mampu menahan laju kriminalitas tersebut. Pelaku kriminalitas menganggap bahwa keadilan dan kesejahteraan sosial yang dijadikan prinsip dasar pemerintahan kerajaan dan kolonial itu pada akhirnya hanya bersifat elitis. Tidak ada hukuman yang tegas kepada para penguasa yang bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Di Pamekasan pun aktifitas perompak di laut pun semakin massif. Banyak pedagang kaya yang menjadi korban perampokan itu. Di abad ke-19, masyarakat Madura sering terlihat membawa senjata tajam seperti pedang dan clurit ketika berada di ruang publik. Seolah-olah mereka berada dalam kondisi ketidakamanan dan berpotensi melawan terhadap hukum yang berlaku. Meskipun akhirnya pihak kolonial dan kerajaan lokal mengeluarkan peraturan untuk pelarangan membawa senjata tajam, tapi ternyata masyarakat Madura menolaknya sebelum keadilan dan kesejahteraan sosial mereka bisa terpenuhi secara layak (De Jonge, 2003).

Rakyat Madura makin menderita ketika munculnya reorganisasi ekonomi dan politik yang diterapkan kolonial Belanda. Secara

menyeluruh, sistem Liberal ini mulai diterapkan sejak 1870. Namun, sebelum 1870, sistem liberal itu telah dilakukan, tapi belum total. Liberalisasi di Madura menguntungkan kolonial Belanda, priyayi atau penguasa Madura, serta pemodal Asing (Cina, Eropa, Arab dan Melayu). Peraturan liberalisasi dan reorganisasi Belanda di Madura itu dikeluarkan di tahun 1853 untuk Pamekasan, 1883 untuk Sumenep dan 1885 No.2/c untuk Bangkalan. Perlu ditekankan bahwa peraturan ini bukanlah bertujuan meminimalisir korupsi di kalangan elite kerajaan di Madura. Sejarah pun mencatat bahwa abad ke-18 dulu, banyak petinggi VOC di Jawa yang korup. Bahkan, M.C. Ricklefs secara tegas mengatakan bahwa adanya aturan pihak Belanda di masa tanam paksa dan liberalisasi, hanyalah menyuburkan penyelewengan keuangan dari pihak elite pribumi, pengusaha dan para pejabat Belanda di daerah.

Adanya peraturan tertulis diatas merupakan upaya kolonial memonopoli perekonomian Madura, memperluas kapitalisme dan memperlemah suatu tuntutan dan protes berlebihan dari rakyat. Posisi elit Madura dan barisannya hanyalah sebagai katup penyelamat Belanda yang diikat oleh pemberian gaji, tunjangan, hak istimewa lainnya berupa tanah, bebas pajak dan tenaga kerja. Sistem ini semakin memperkuat satu garis demarkasi antara penjajah dan rakyat kecil yang dijajah; si miskin dan si kaya; pemodal dan yang dieksploitasi; elit yang sejahtera dan rakyatnya yang sengsara. Tidak ada satupun kebijakan dan langkah politik di era kolonial dan di masa kerajaan Madura yang betul-betul memihak nasib rakyat kecil (*teghâ dhâ' rèng kènik*).

Liberalisasi ekonomi membuat monetisasi di dalam kehidupan rakyat Madura. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan rumah pegadaian dan bank-bank di desa dan kota di Madura. Pada 1894-1910, ada 8 kantor gadai di Madura. Pada 1913, rumah gadai sebanyak 15, tersebar dari Pamekasan, Kamal, Bangkalan, Sampang dan Sumenep. Sementara, para orang kaya dari kalangan Cina, Arab dan pribumi sendiri lebih banyak bergerak sebagai rentenir. Mereka biasanya bertindak sebagai perantara pajak dengan cara membayarkan 2% pajak usaha nelayan dan petani yang tidak mampu membayar. Kemudian, nelayan dan petani itu membayarnya dengan hasil panen yakni sebesar 1/8, 1/10 hingga 1/12 kepada rentenir tadi.

Beban penderitaan psikologis, sosial, ekonomi serta politis itulah justru menimbulkan gerakan resistensi dari masyarakat akar rumput. Rakyat merasa tidak ada keadilan dan kesejahteraan sosial, meski sekian lama telah patuh serta tunduk terhadap berbagai kepentingan elite politiknya. Semakin patuh justru semakin membuat hidup mereka berada di ambang batas eksploitasi dan alienasi. Maka, muncullah sosok jagoan yang merupakan representasi dari kekuatan kaum marjinal dan rakyat kecil. Sosok jagoan Madura ini yang dikenal dengan *Blatèr*.

Setelah masa kolonial Belanda berakhir dan kemerdekaan Indonesia mulai terbangun, harapan masyarakat Madura akan kehidupan yang sejahtera, adil dan aman semakin besar kualitasnya. Dengan terbentuknya negara otonom, tanpa ditunggangi kepentingan pihak kolonial, maka perhatian yang maksimal terhadap kehidupan yang layak bagi rakyatnya semakin besar. Diharapkan ada kebijakan ekonomi-politik yang populis bagi rakyat Madura. Sehingga, roda perekonomian masyarakat Madura yang banyak mengandalkan pada usaha pertanian menjadi lebih baik. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Masih saja ada perlakuan yang tidak pro rakyat dalam kehidupan masyarakat Madura. Korupsi, kolusi dan nepotisme masih sering terjadi di Madura. Beberapa waktu lalu, ketika berada di lapangan, terdengar kabar adanya praktek korupsi dana pengentasan kemiskinan yang melibatkan elite politik dan kaum intelektual setempat. Dalam rekrutmen PNS pun seringkali diwarnai praktek KKN. Di Pamekasan misalnya terjadi kasus KKN perekrutan PNS pada 2007 dan 2008. Ternyata, pelakunya adalah orang birokrasi itu sendiri.

Banyak rakyat Madura menderita karena harga tembakau selalu dipermainkan oleh pemilik pabrik yang kebanyakan orang cina. Telah terjadi politisasi tembakau di daerah Madura. Hasil tesis Imam Zamroni telah menegaskan hal itu. Menurutnya, politisasi tembakau itu tampak sekali dalam Perda No.2/2002 tentang Pengelolaan Tembakau dan Perda No. 3/2003 tentang Pengendalian Mutu dan Perlindungan Keaslian Tembakau. Dengan adanya perda ini seharusnya mampu melindungi petani tembakau dari praktek pemanipulasian harga tembakau dan konspirasi pihak tengkulak. Namun yang terjadi harga tembakau mudah dipermainkan oleh pemilik gudang dan para tengkulak. Ada saja taktik gudang guna menurunkan harga tembakau itu dengan cara mengatakan

bahwa stok tembakau di gudang masih cukup. Maka, kemudian yang menjadi harapan satu-satunya adalah tengkulak yang menghubungkan antara pabrik dan petani. Hanya saja yang terjadi adalah konsiprasi. Para tengkulak akan merendahkan harga tembakau petani kemudian mereka akan menjualnya dengan harga mahal ke dalam pabrik. Pihak pabrik akan meraup keuntungan dengan jalan mengambil sampel tembakau yang menurut Perda tidak boleh melebihi 1 kg. Karena, pengambilan sampel itu tidak ada kompensasi kepada para petani tembakau. Ironisnya, pihak birokrasi setempat dan LSM pun tidak ada yang berani menegur kesalahan pabrik dan para tengkulak, karena ternyata mereka semua telah terkoneksi dalam kepentingan ekonomis dan politis (Zamroni, 2005: 72-75).

Kemiskinan yang terjadi di Madura memiliki ekses buruk, karena memperkokoh terjadinya praktek kriminalitas. Kriminalitas ini pun terjadi karena sifat bawaan manusia yang penuh kebebasan tidak terikat dengan struktur apa pun pada masa lampau muncul kembali ketika ada ketimpangan kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi secara layak karena kuatnya kekuasaan dan birokrasi pada sektor kehidupan publik di era modern (Lambroso, dalam Bartol & Bartol, 1994). Kebutuhan hidup yang semakin bertambah, tapi tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan dan penyediaan lapangan kerja yang memadai justru menjadi pemicu munculnya patologi sosial, seperti kriminalitas. Kemiskinan yang masih mendera masyarakat Madura ternyata selama ini belum bisa terselesaikan secara tuntas. Akar persoalannya bukan hanya karena tipikal tanah tegalan di Madura yang memang tidak memberi peluang yang besar dalam produksi dan diversifikasi pertanian. Melainkan juga, komitmen pemerintah dan penguasa lokal yang lebih mengutamakan kepentingannya sendiri. Aspirasi rakyat Madura yang banyak disuarakan para elite setempat, ternyata hanya berujung simbolis semata, sebatas kata-kata tanpa ada wujud nyatanya. Kemiskinan diwacanakan dengan penuh semangat ketika proses pemilu lokal diselenggarakan (entah Pilbup ataupun Pilkades). Namun, pada saat kandidat itu terpilih, gerakan pemberantasan kemiskinan yang pernah mereka wacanakan lantas dilupakan. Rasa kekecewaan yang semakin besar terhadap prilaku elite penguasa tersebut membuat sebagian besar rakyat mengambil langkah nekad. Data statistik kriminalitas yang dihimpun pihak kepolisian Madura menunjukkan

adanya peningkatan signifikan setiap tahunnya.

TABEL 2. TINGKAT KRIMINALITAS/POLRES TAHUN 2004-2007

Kesatuan	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007
	Crime*	Crime	Crime	Crime
Polres Bangkalan	154 kasus	305 kasus	335 kasus	382 kasus
Polres Sampang	195 kasus	230 kasus	248 kasus	397 kasus
Polres Pamekasan	446 kasus	516 kasus	536 kasus	555 kasus
Polres Sumenep	319 kasus	465 kasus	483 kasus	497 kasus
Total	1.474	1.516	1.602	1.911

Sumber: Data Kriminalitas Polwil Madura. Data telah diolah kembali. (*: Kriminalitas yang didata oleh Polwil Madura adalah pencurian_dengan kekerasan ataupun tidak_, tindak pembunuhan, perjudian, narkoba, merampok, penganiayaan dan penggunaan sajam/senjata tajam)

Data diatas menunjukkan, bahwa angka kriminalitas di Madura dari 2004-2007 semakin meningkat tajam. Padahal, pada periode ini merupakan periode dimana proses demokrasi prosedural benar-benar dimulai. Pada 2004, merupakan awal pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung. Janji-janji politik yang indah tentang perbaikan nasib rakyat ketika masa-masa kampanye sudah bertebaran dimana-mana. Rakyat Madura memilih calon pemimpinnya tidak didasarkan pada kredibilitas sang kandidat melainkan karena intervensi dan dominasi dari komunitas *Blatèr* setempat. Sejumlah informan menjelaskan bahwa para *Blatèr* memiliki majikan politiknya masing-masing. Mereka diperintahkan mencari dukungan suara sebanyak-banyaknya agar parpol dan calon pemimpin yang menjadi majikan para *Blatèr* tersebut mendapatkan peluang menang yang besar. Di sini menunjukkan bahwa lemahnya peran pihak keamanan dalam mengatasi praktek intimidasi politik yang dilakukan para *Blatèr*. Apapun alasannya, intimidasi politik dalam demokrasi termasuk “dosa besar” karena mengingkari hak rakyat dalam menentukan pilihan politiknya. Elit penguasa dan parpol (partai politik) ternyata turut mendukung penggunaan peran *Blatèr* dalam proses demokrasi. Sehingga, aparat keamanan di Madura merasa segan apabila mereka hendak menangkap ataupun menghukum para *Blatèr* yang melakukan intimidasi politik. Hal ini disebabkan masih kentalnya budaya sopan-santun kepada penguasanya (*ratoh*).

Setiap pemilihan kepala daerah (dari kepala desa hingga gubernur) dan presiden, komunitas *Blatèr* ini selalu merasa senang karena di saat

itulah mereka mendapatkan proyek besar. Mulai dari parpol hingga para kandidat pemimpin selalu menggunakan peran *Blatèr* untuk mencari dukungan suara dari para rakyat. *Blatèr* biasanya mendapatkan uang lelah sekitar 5-10 juta rupiah dari para kandidat Pilkada. Bahkan, ada yang mendapatkan uang lebih dari 10 juta. Besaran jumlah uang ini bergantung pada seberapa banyak suara yang dibutuhkan para kandidat dan seberapa rentan usaha mereka untuk mengamankan suara rakyat tersebut supaya benar-benar memilih sang kandidat. *Blatèr* tidak pernah bekerja sendirian. Mereka melakukan kerja politiknya itu secara kolektif dan terencana, termasuk siap menghadapi resiko apapun. Hal ini dikarenakan mereka menghadapi dua kekuatan besar di lapangan. *Pertama*, pihak kepolisian. Pihak *Blatèr* seringkali bekerja sama dengan sejumlah kepolisian setempat dalam melaksanakan rencana politiknya. Karena tidak semua anggota kepolisian pragmatis seperti itu, maka kerjasama mereka pun terancam dari pihak kepolisian lainnya yang masih menjaga idealisme profesi mereka.

Pada saat pemilihan Bupati Pamekasan 2009 lalu, terjadi pertengkaran hebat di desa tengkik antara pihak *Blatèr* yang bekerjasama dengan anggota kepolisian kecamatan (Polsek) dan *Blatèr* yang bekerjasama dengan anggota kepolisian wilayah (Polwil). Pertengkaran itu berakibat kedua pihak kepolisian itu saling tangkap-menangkap para anggota *Blatèr* dengan alasan mengganggu ketertiban umum. Padahal, akar masalah bukan persoalan keamanan. Tetapi karena politik, kompetisi memobilisir suara rakyat untuk memilih kandidat bupati. *Blatèr* yang bekerja sama dengan kepolisian kecamatan mendukung calon bupati dari partai Islam, sementara itu *Blatèr* yang bekerja sama dengan kepolisian wilayah mendukung calon bupati dari partai demokrat. Mereka saling bertikai karena pihak *Blatèr* saling berebut suara rakyat tanpa memperhatikan etika sosial. Etika politik yang ideal menurut komunitas *Blatèr* adalah pembagian suara berdasarkan status sosial di suatu rumah tangga. Pihak *Blatèr* yang satu masuk ke rumah-rumah untuk mengajak kepala rumah tangga memilih kandidat yang diusung sang *Blatèr*. *Blatèr* yang lain masuk ke rumah-rumah meminta anggota keluarga lain (istri dan anak yang sudah dewasa) untuk memilih kandidat yang lain. Ini merupakan pembagian yang adil menurut etika politik *Blatèr*.

Tapi, pihak *Blatèr* jarang menggunakan etika politik seperti itu. Karena

memenangkan calon yang membayarnya dengan cara apapun merupakan hal yang utama bagi peningkatan ekonomis dan reputasinya. Maka, anggota keluarga di rumah-rumah kemudian diintimidasi agar memilih salah satu calon pemimpin saja, tidak diperkenankan memilih yang lain. Diantara mereka saling berkompetisi dengan cara kekerasan dan tidak beradab agar tujuan politik ini tercapai. Resiko apapun akan mereka hadapi meskipun berhadapan dengan kekuatan aparat keamanan legal sekalipun.

Strategi dominasi *Blatèr* ini semakin massif karena dibekengi aparat keamanan legal. Mereka yang tidak mau mengikuti kehendak *Blatèr*, maka harta berharganya akan dicuri. Sapi dan kendaraan bermotor merupakan harta berharga bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat desa. Harta berharga inilah yang akan dicuri *Blatèr* supaya rakyat mengalami gangguan ekonomis dan psikologis. Pihak kepolisian setempat biasanya tahu tentang seluk-beluk kasus pencurian ini. Ketika masyarakat sudah merasa ketakutan, maka pihak *Blatèr* akan menawarkan kembali keinginan politiknya. Sebagai strategi pencitraan, maka kandidat lantas akan memanfaatkan situasi kekacauan tersebut untuk turun ke lapangan membawa isu-isu peningkatan keamanan di masyarakat secara serius (jika terpilih nanti). Supaya terlihat komitmen, pihak keamanan dimintai bantuan supaya diturunkan dilapangan menjaga keamanan desa. Harta yang telah dicuri tersebut lantas dengan cepat ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya, tetapi pencurinya tidak diketahui. Cukup aneh, karena sapi hasil curian ditemukan sementara pencurinya tidak berhasil ditangkap. Memang beginilah strategi politik keamanan yang dilakukan komunitas *Blatèr* agar mendulang suara rakyat yang terakumulasi secara dominan kepada kandidat tertentu.

Kedua, pihak penguasa (penyandang dana). Bagi penguasa yang telah “membeli” tenaga dan peran *Blatèr* dalam pentas politik tentunya tidak mau tahu bagaimana cara yang digunakan *Blatèr*. Bagi penguasa yang utama adalah kemenangan dan kesuksesan. Apabila pada akhirnya mereka pun kalah, tentu akan diterima asalkan kerja *Blatèr* sudah sangat maksimal dan tidak melakukan suatu pengkhianatan. Tetapi di lapangan, ada saja *Blatèr* yang melakukan peran ganda. Di satu sisi, dia memihak pada salah satu kandidat, tetapi di sisi lain juga menerima tawaran dari kandidat lainnya. Mereka tentu akan melakukan perannya mencari dukungan suara

rakyat, tetapi tetap membutuhkan kerja sama dengan *Blatèr* dari pihak lainnya. Artinya, di lapangan mereka akan melakukan tindakan manipulasi suara rakyat agar terkesan telah melakukan perannya sebagaimana mestinya. Tindakan manipulasi yang dilakukan adalah penggandaan pemilih melalui manipulasi KTP. Pengelolaan data statistik di daerah yang buruk ternyata dimanfaatkan oleh *Blatèr* untuk mendapatkan suara siluman untuk diberikan kepada kandidat yang membayarnya. Tetapi, sang kandidat bukan orang yang mudah dimanipulasi. Mereka juga telah menyediakan mata-mata dilapangan untuk mengawasi kerja dan peran *Blatèr* yang disewanya. Apabila terjadi penyelewengan peran, maka tidak segan-segan *Blatèr* yang disewa penguasa untuk memata-matai itu juga mendapatkan tugas memberikan menghukum kepada para *Blatèr* yang menyeleweng. Hukuman ini seringkali berwujud kekerasan semacam carok hingga pembunuhan. Konsekuensinya akan ada pemenang dan pecundang. Ada yang hidup dan ada yang harus mati. Mereka yang berhasil memenangkan pertarungan, akan dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara pihak yang kalah dalam pertarungan dianggap jagoan yang amatiran (*gi' tèmittè*) dan akan menjadi bahan olok-olokan sesama *Blatèr* saat berinteraksi. Bagi *Blatèr* tidak ada yang namanya benar-salah dalam politik, karena yang ada adalah menang-kalah. Meskipun salah tapi berhasil memenangkan pertarungan biasanya akan dianggap orang kuat (*angko/rèng saktè*)³.

KESIMPULAN

Siapa yang mampu menciptakan keamanan, mereka akan mendapatkan kekuasaan. Modal kekuasaan bukan sekadar memiliki jabatan dan kedudukan di suatu partai politik ataupun birokrasi dan pemerintahan. Modal kekuasaan bukan pula sesuatu yang berharga secara ekonomis. Bukan pula sosok orang yang memiliki garis keturunan keluarga adat yang kokoh secara budaya. Modal kuasa itu ada apabila seseorang ataupun sekelompok orang mampu bertahan dalam situasi zaman apapun. Cara mereka bertahan supaya mampu memiliki modal kekuasaan adalah menggunakan keberanian dan segala kemampuan yang ada dalam diri dan komunitasnya dalam menghadapi tantangan dan resiko apapun. Foucault (1977: 145) mengatakan dengan tegas bahwa kekuasaan adalah

strategi dan teknik yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk membuat orang lain terbatas gerak hidupnya dalam arti menderita karena dominasi dan hegemoni atau justru melesat jauh menjadi kelompok resisten mendobrak berbagai bentuk dominasi dan hegemoni. Orang yang tunduk bukan berarti adalah objek kekuasaan sepenuhnya. Karena bagi Foucault kekuasaan akan melahirkan perlawanan. Ini artinya objek kekuasaan bisa sejenak menghayati kekuasaan yang menimpa dirinya, tetapi sekaligus belajar bagaimana melawan sumber kekuasaan itu sendiri. Buah mangga yang dibungkus rapi oleh pemiliknya akan berpotensi hilang karena diambil orang. Ini adalah salah satu contoh nyata mengapa seringkali kekuasaan cenderung melahirkan resistensi atau counter kekuasaan.

Dalam perjalanan sejarah, orang-orang kecil yang tidak berdaya secara struktur ekonomis dan politik mudah dihilangkan dalam jejak rekam pengetahuan. Sehingga episteme sosial yang diurai dan dipublikasikan selama ini adalah episteme sosial elite dan rezim penguasa. Rakyat jelata dan kelas sosial miskin adalah orang-orang pinggiran yang dinilai tidak layak dicatat dalam goresan sejarah kehidupan. Namun, komunitas marjinal ini memiliki kekuatan yang mampu memecahkan kebekuan kekuasaan struktural negara. James Scott (1998) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa petani kelas bawah di Asia yang seringkali menjadi objek kekuasaan pemilik modal dan tuan tanah tidak serta merta menjadi komunitas yang tidak berdaya. Mereka memiliki strategi perlawanan yang tidak diduga-duga untuk mencounter kekuasaan kelas atas dan pemilik modal. Para petani menanam sawah mereka dengan tanaman subsisten agar ditengah-tengah tanaman komersial di sebagian besar wilayah Asia. Bagi Scott, senjata orang-orang pinggiran terletak pada kemampuan mereka melawan kekuasaan dengan cara berbeda, yang halus, tidak kentara tapi massif. Kekuatan komunitas Jagoan di Madura pada dasarnya berawal dari gerakan resistensi semacam ini. Mereka menolak mengikuti aturan dan kebijakan penguasa kolonial dengan jalan melakukan praktek kriminalitas sebagai praktek kekuasaan tandingan.

Kondisi tanah Madura yang tidak memungkinkan keberlanjutan ekonomis secara intensif turut serta memperkuat gerakan perlawanan alternatif yang dilakukan para komunitas rakyat kecil. Kondisi tanah tegal di Madura sebenarnya mampu menjadi penopang hidup subsisten or-

ang Madura apabila tidak ada kebijakan ekonomi-politik kolonial yang cenderung mengeksploitasi tanah dan sumber daya manusia. Kebijakan sewa tanah, tanam paksa dan liberalisasi ekonomi membuat tanah Madura menjadi tidak produktif lagi karena kekuatan tanah dipaksa ditanami tanaman komersial. Di sisi lain, para pekerja (petani) juga menjadi penderitaan dalam menjalankan perannya sebagai anggota keluarga dan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya dengan strategi resiprokal (saling memberi). Tenaga dan waktu mereka terkuras habis untuk memenuhi kepentingan rezim kolonial dan penguasa lokal. Akibatnya, muncullah kelompok resisten yang menamakan diri mereka sebagai *Blatèr*. Dengan memegang idealisme kerakyatan, para *Blatèr* ini sering mengganggu sistem kerja kekuasaan struktural negara dan pemerintah. Keamanan sosial menjadi terganggu dengan aktifitas mereka. Tujuan dari kondisi ini agar pihak penguasa sadar diri bahwa rakyat yang menderita bisa melakukan perlawanan dengan cara yang tidak diduga-duga: praktek kriminalitas dan tindakan kekerasan melawan hukum dan kebijakan yang tidak adil.

Namun, kekuatan kelompok jagoan Madura ini tidak konsisten dengan ideologi kerakyatan yang pada awalnya menjadi api gerakan perubahan. Pada masa orde baru, mereka tidak berdaya dan mudah ditunggangi oleh kepentingan penguasa dan elite politik. Siegel (2002; 100-110) menunjukkan hasil penelitiannya di Indonesia di era orde baru bahwa kelompok jagoan seperti preman tidak lagi kelompok sosial yang otonom, karena mereka sudah menjadi hamba partai politik dan rezim Orde Baru untuk melancarkan kepentingan ekonomi-politik pemerintah. Dalam setiap pemilu, peran mereka juga digunakan untuk mensukseskan kepentingan politik rezim Orde Baru. Apa yang dilakukan kelompok jagoan ini bisa dimengerti karena situasi politik pada saat itu dijalankan dengan sistem fasisme dan otoriterianisme. Dalam sistem otoriter dan fasisme, semua kekuatan harus tunduk dan patuh pada kekuatan tunggal yakni penguasa negara. Budaya Jawa yang mengenal prinsip kekuasaan tunggal dan terpusat, dalam arti tidak bisa terbagi kepada kekuasaan lainnya, semakin memperkuat kekuasaan fasisme dan otoriterian yang dijalankan rezim orde baru waktu itu (Anderson, 2000 dan 2001). Keamanan menjadi mustahil didapatkan selama masyarakat tidak mengikuti petunjuk

dan arahan dari penguasa mereka. Melawan kebijakan dan kepentingan rezim orde baru, berarti makar dan subversif, karena itu para pelakunya harus dihukum tegas.

Era demokrasi yang telah menggantikan rezim orde baru tersebut diharapkan mengembalikan kekuatan masyarakat agar menjalankan kehidupannya menjadi lebih otonom. Prinsip kebebasan yang menjadi jargon utama dalam demokrasi dianggap sebagai modal utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat menjadi lebih manusiawi. Namun, situasinya tidak seperti yang diharapkan. Kebebasan dalam prinsip demokrasi hanya dapat dimanfaatkan secara sebaik-baiknya oleh komunitas jagoan, seperti *Blatèr*. Mereka dapat memanfaatkan kebebasan tersebut dengan jalan bekerja sama dengan para elite penguasa dan elit budaya Madura. Ini langkah awal yang dilakukan para komunitas *Blatèr* agar kebebasan itu bisa digunakan seluas-luasnya oleh mereka. Langkah ini dilakukan atas dasar kuatnya budaya masyarakat Madura yang masih kental dengan prinsip sopan-santun (*andhâp-asor*) kepada mereka yang berkuasa (*rato*). Karena sudah mendapatkan dukungan kekuatan penguasa ini, lantas komunitas jagoan mulai melaksanakan agenda kekuasaannya dengan cara menjalankan politik keamanan. Keberanian, kenekatan, kolektifitas, dan kekuatan personal yang dimiliki mereka adalah senjata utama dalam menjalankan politik keamanan. Kekuatan seperti ini tidak dimiliki oleh rakyat pada umumnya. Sehingga, komunitas *Blatèr* dengan mudah melakukan agenda politik keamanan di akar rumput. Praktek kriminalitas yang sudah menjadi kebiasaan komunitas *Blatèr* menjadi modal utama dalam menggerakkan politik keamanan. Kriminalitas sangat dekat dengan rasa takut, ancaman dan kekhawatiran. Karena itu, mendengar wacana kriminalitas kebanyakan orang langsung tertuju pada kekerasan, pembunuhan, perkosaan hingga pencurian yang menimbulkan korban harta-benda dan jiwa. Bagi kaum *Blatèr*, kriminalitas merupakan modal kekuasaan dalam rangka meningkatkan sekaligus mempertahankan eksistensinya di masyarakat. Mereka ingin dianggap sebagai komunitas yang turut serta mengendalikan kehidupan masyarakat. Mereka memanfaatkan demokrasi sebagai momentum untuk mengkonsentrasikan kekuasaannya melalui politik keamanan yang bisa ditawarkan kepada siapa saja yang ingin memenangkan pertarungan dalam pentas politik yang demokratis.

Betapa pentingnya suatu keamanan dalam era demokrasi. Apabila masyarakat merasakan keamanan yang maksimal, maka mereka akan lebih rasional dan leluasa menggunakan kebebasan hak berpolitiknya. Minimal, masyarakat mampu memilih kandidat pemimpin yang sesuai hati nurani dan aspirasi mereka tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Tetapi, kebebasan menggunakan hak-hak politik itu membutuhkan keberanian. Berani mengkritik, berani berdialog dan berani mengontrol elite masyarakatnya. Kultur masyarakat Madura sebenarnya memungkinkan menjalankan demokrasi yang sebenar-benarnya karena telah didukung oleh kultur keberanian yang telah disosialisasikan sejak masa anak-anak oleh orang tuanya. Yakni, anak laki-laki harus berani dan bersikap tegas (*angko/bengalan*). Ironisnya, kultur itu harus dibatasi oleh kultur penghormatan kepada mereka yang lebih berkuasa. Karena itu, masyarakat Madura dihadapkan pada praktik budaya yang membatasi mereka menjadi agen pengontrol kekuasaan para elitnya. Stratifikasi sosial yang ketat dan kurang fleksibel membuat nilai penghormatan terhadap elite Madura semakin kuat. Rasa takut ini yang kemudian dimanfaatkan komunitas *Blatèr* di zaman yang demokratis seperti sekarang ini. Dalam konsepsi masyarakat Madura, dengan tunduk dan patuh pada penguasa maka otomatis pihak penguasa akan memberikan rasa aman dan melindunginya dari berbagai bentuk ancaman.

Namun, harapan itu tidak terwujud sebagaimana mestinya karena ternyata peran keamanan diambil oleh komunitas *Blatèr*. Bahkan, mereka lebih berkuasa dan mampu mengendalikan rasa aman daripada yang dilakukan oleh aparat keamanan legal seperti kepolisian. Penyelesaian sengketa dalam perebutan suara pilkadal misalnya ternyata pihak *Blatèr* lebih memilih menyelesaikannya dengan cara carok ataupun pembunuhan daripada masing-masing pihak yang bertikai harus pergi melaporkannya kepada pihak kepolisian. Ini bukan berarti mereka kecewa dengan kinerja kepolisian, tetapi cara-cara adu kekuatan dan kekerasan seperti itu menjadi strategi akumulasi kekuasaan diantara para *Blatèr*.

Itu artinya, di dalam sistem demokrasi diperlukan keberanian bertindak dan membebaskan diri dari berbagai ketakutan apapun. Jika memang demokrasi bertujuan untuk memilih pemimpin ideal dan populis, maka yang paling utama dilakukan adalah bagaimana caranya menciptakan rasa

aman di masyarakat sebelum proses demokrasi dijalankan. Tentu, negara wajib hukumnya menciptakan rasa aman terhadap warganya, termasuk rasa aman dari praktek kekuasaan para jagoan Madura. Jika ini tidak dilakukan segera, maka demokrasi yang dijalankan saat ini adalah demokrasi untuk para jagoan saja. Karena mereka yang paling tahu bagaimana menciptakan rasa aman di masyarakat tatkala proses pemilihan pemimpin (pusat dan daerah) secara langsung.

(FOOTNOTES)

- ¹ AktiVitas pertanian yang penting di masyarakat Madura adalah penanaman padi. Penanaman padi ini pada umumnya banyak dipengaruhi oleh musim nambârâ' (musim hujan). Akan tetapi, ketika musim hujan ini terlalu berlebihan, maka membuat tanaman padi menjadi tidak subur lagi (karena kelebihan air). Apalagi, volume hujan itu justru menimbulkan banjir dan menggenangi sawah penduduk. Jikalau ini terjadi, maka ada beberapa alternatif yang dilakukan. Yakni, meneruskan pertumbuhan padi tersebut hingga panen dan hasilnya pun dikonsumsi sendiri. Kedua, menjual hasil panen padi itu dengan harga murah. Atau alternatif lainnya, menanam ulang padi dengan resiko mengeluarkan tenaga dan dana ekstra di dalam hal perairan sawahnya. Jika ini tidak bisa dilakukan, maka pencariin pekerjaan alternatif lain pun mereka lakukan.
- ² Rujukan tentang sejarah kemiskinan yang berujung pada munculnya kriminalitas di Madura ini diambil dari hasil Tesis Ardhie Raditya, 2008 (Genealogi Kuasa Jagoan Madura Timur, tesis PascaSarjana Sosiologi UGM: sedang proses penerbitan di LKiS).
- ³ Informasi tentang praktek kuasa Blatèr dalam ajang pilkadal di Madura ini didapatkan dari 5 informan yang tidak bisa disebutkan nama aslinya. Termasuk nama desa yang ditulis dalam hasil penelitian ini bukanlah nama sebenarnya. Hal ini dilakukan karena tingkat kerawanan dan derajat keamanan sang informan dan peneliti. Tapi kelima informan tersebut memiliki pengetahuan mendalam tentang topik penelitian ini. Ketiga dari informan penelitian ini berstatus sebagai anggota kepolisian yang menjalankan tugasnya tanpa pakaian seragam. Kedua informan lainnya adalah tokoh Blatèr yang sudah tidak aktif lagi di dunia

perBlatèran, meskipun mereka tetap menjalin komunikasi dengan Blatèr sebagai bentuk ikatan persodaraan dan persahabatan. Penggalan data ini dilakukan pada 26 Februari-3 Maret 2012. Waktu wawancara dilakukan pada malam hari, antara 22.00-03.00 WIB. Malam hari adalah waktu yang tepat untuk melakukan wawancara dengan para jagoan karena di saat itu mereka sering berkumpul bersama para Blatèr untuk berbincang-bincang ataupun merencanakan sesuatu yang berharga baginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, R.O'G., Benedict.2001. *Violence and the State in Suharto's Indonesia*. New York. SEAP, Cornell University Ithaca.
- _____ 2000. *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-Budaya dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta. Mata Bangsa.
- Bartol dan Bartol. 1998. *Psychology of Crime*. USA. Routledge.
- Budiardjo, Miriam (ed) . 1984. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*. Jakarta. Sinar Harapan.
- Castel, Manuel. 2000. *Network Society*. USA. Routledge.
- De Jonge, Huub, (ed). 1989. *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi : Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*. Jakarta. Rajawali Press.
- _____ .2003. *Madura dalam Empat Zaman*. Jakarta. Gramedia.
- Diamond, Larry. 2000. *Konsolidasi Demokrasi*. Yogyakarta. Ire Press.
- Fatah, Zainal . 1912. *Sedjarah Tjaranja Pemerintahan di Pulau Madura*. Surabaya.Paragon Press.
- Fath, Kutwa, dkk. 2007. *Pamekasan dalam Sejarah*. Pamekasan. Depdikbud.
- Foucault, Michel. 2002. *Power/Knowledge (terj.)*. Yogyakarta. Bentang.
- _____ .1977. *Disipline and Punish: The Birth Of The Prison*. New Zeland. Pinguin Books.
- Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit*. Yogyakarta. PLOD dan JIP.
- Hobsbawm, Eric J. 2000. *Bandit Sosial*. Jakarta.Teplok Press.
- Kartodirjo, Sartono, dkk .1977. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta. Gramedia.
- Kuntowijoyo. 2002. *Madura (1850-1940)*. Yogyakarta. Mata Bangsa.
- Latif, Yudi. 2005. *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia*

- Muslim Indonesia Abad Ke-20*. Bandung. Mizan.
- Mainheim, Karl. 1992. *Ideologi dan Utopia*. Yogyakarta. Kanisius.
- Mansurnoor, Arifin, Iik. 1990. *Islam In an Indonesian World Ulama of Madura*. Yogyakarta. UGM Press.
- Niehof, Anke. 1948. *Women And Fertility In Madura (Indonesia)*, Leiden. KITLV.
- Pamekasan dalam Angka, 2006
- Patria, Nezar & Gunawan, Rudy, Fx. 2000. *Premanisme Politik*. Yogyakarta. ISAI.
- Pitaloka, Rieke Diah. 2005. *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*. Yogyakarta. Galang Press.
- Raditya, Ardhie. 2008. *Genealogi Kuasa Jagoan Madura Timur*. Yogyakarta. Pasca sarjana Sosiologi UGM.
- Ricklefs, M.C. 1981. *A History of Modern Indonesia*, (Edisi Pertama). Yogyakarta. UGM Press.
- Rifai, Ahmad, Mien. 1993. *Lintasan Sejarah Madura*. Surabaya. Yayasan Lebbur Legga.
- Rozaki, Abdur. 2004. *Manabur Kharisma, Menuai Kuasa*. Yogyakarta. Galang Press.
- Sanderson, Stephen. 2003. *Makro Sosiologi (Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial)*. Jakarta. Rajawali Press.
- Sarup, Madan. 2003. *Post-strukturalism and PostModernism*, (terj. Yogyakarta. Jendela.
- Scott, James. 1998. *Senjatanya Orang-orang Kalah*. Jakarta. LP3ES.
- Siegel, T. James. 2000. *Penjahat Gaya Orde Baru*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press.
- Subahianto, A., dkk. 2004. *Tantangan Industrialisasi Madura*. Malang. Bayumedia.
- Suhartono. 1995. *Bandit-bandit Pedesaan di Jawa*. Yogyakarta. Aditya Media.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Grasindo.
- Wiyata, A. Latief. 2002. *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta LKIS.

- Zamroni, Imam. 2006. *Dinamika Kekuasaan Elite Ekonomi Lokal Pasca-Soeharto di Pamekasan-Madura*. Tesis Pascasarjana Sosiologi UGM: Tidak Dipublikasikan
- Zulkarnaen, Iskandar dkk. 2003. *Sejarah Sumenep*. Sumenep. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.